

ANALISIS POTENSI GOLPUT PADA PEMILU 2014 DI KOTA YOGYAKARTA

Mustadin

Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga
email : mustadin82@gmail.com

ABSTRACT

The number of abstentions in the city of Yogyakarta was the biggest in the province of Yogyakarta in election 2009. The result showed the level of non-voters in the city of Yogyakarta was 34%. Abstentions in Yogyakarta occurred tendency increasingly in every election in Indonesia. Therefore, this study try to exploring and reading on the causes and potential abstentions in the 2014 general election in Yogyakarta.

This study used qualitative research methods. This research tries to explore the phenomenon of non-voters with a theoretical approach, and then this research explored the phenomenon of non-voters within-depth interviews for Election Commission of Yogyakarta (KPU).

The results showed there are several factors influenced non-voters in the city of Yogyakarta. First; Technical factors, the example is sickness of voters when the election process. Second, Job factor or voter's daily activities. Third; administrative factor is a factor related to the administrative aspects of the resulting voters could not exercise their voting rights.

Keywords: *Abstentions, Qualitative, Yogyakarta.*

ABSTRAK

Angka golput di kota Yogyakarta pada pemilu tahun 2009 terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 30% pada tingkat pemilih golput dan menunjukkan peningkatan setiap pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan membaca potensi golput di pemilu tahun 2014 di kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk menjelaskan fenomena golput dengan pendekatan teoritis dan melalui wawancara mendalam terhadap Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi golput di kota Yogyakarta. Pertama faktor teknis, contoh tidak memilih karena sakit. Kedua faktor pekerjaan atau rutinitas sehari-hari. Ketiga faktor administratif yang menyebabkan hilangnya hak memilih. Penelitian ini menemukan golput di Yogyakarta

Kata kunci : *Golput, Kualitatif, Yogyakarta*

PENDAHULUAN

Pemilu 2014 baik pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan Presiden (pilpres) masih setahun. Meski masih terhitung lama, akan tetapi "aromanya" sudah tercium semerbak jika tidak ingin dikatakan "menyengat". Tahapan yang masih berlangsung ialah menyiapkan perangkat penyelenggara pemilu, baik dari anggota komisioner KPU

Kab/Kota maupun perangkat kesekretariatan lainnya, dan para calon legislatif tersebut telah diumumkan tanggal 23 sampai dengan 25 agustus 2013 menurut PKPU no. 06 tahun 2013 (Mustadin, 2013).

Berbagai momentum digunakan oleh para kandidat wakil rakyat untuk meraih simpati, walaupun tahapan masih panjang dan belum dimulainya masa kampanye secara resmi.

Tidak kalah gesitnya juga ialah para kandidat calon presiden yang sudah mulai berlomba-lomba melakukan “penetrasi publisitas” dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai media yang ada (Mustadin, 2013).

Di Indonesia terdapat data pergerakan partisipasi pemilih yang cukup dinamis dan relatif tidak menetap. Data yang di ungkapkan Mujani dan kawan-kawan (2012) bahwa pada pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih mencapai 86 %, dan sepuluh tahun kemudian pada tahun 2004 tingkat partisipasi pemilih turun drastis mencapai 70%, dan pada pemilu 2009 angka golput atau tidak memilih berdasarkan data dari KPU 29% atau yang terlibat memilih hanya berjumlah 71% ([http//kpu.go.id](http://kpu.go.id)).

Data nasional menunjukkan bahwa jumlah DPT dan DPT tambahan yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput sebesar 29 % sedangkan Provinsi DI Yogyakarta secara keseluruhan jumlah golputnya mencapai 27% dan penyumbang terbesar adalah kota Yogyakarta sebanyak 33,46% golput pada pemilu 2009 tersebut.

Hasil Pemilu 2009 di Yogyakarta menunjukkan tingkat partisipasi dalam pemilu bisa dikategorikan cukup rendah hanya mencapai 65% dan golput sekitar 34,46%. Dari beberapa dapil yang dirilis oleh KPU Kota Yogyakarta dalam situs resminya. Hal tersebut tersebar dalam beberapa dapil dan hampir semuanya merata disetiap kecamatan di Yogyakarta.

Angka golput di Yogyakarta ini cukup mencengangkan dan membuat banyak pihak berspekulasi akan fakta menyediakan tersebut. Beberapa pihak menyalahkan DPT, dan beberapa pihak yang lain menyalahkan kinerja KPU Kota Yogyakarta yang belum maksimal. Oleh sebab itu penelitian ini akan mencoba menelisik potensi tidak memilih atau golput pada pemilu 2014 di kota Yogyakarta seberapa besar peran agama mempengaruhi pilihan partai politik di Kota Yogyakarta pada pemilu legislatif 2014 nanti.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana menjelaskan

Tabel 1. Data perolehan suara dan golput Pemilu 2009 di Kota Yogyakarta

NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT	DPT TAMBAHAN	TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	
1	MANTRIJERON	27.053	69	8.178	30,23%
2	KRATON	18.130	42	5.872	32,39%
3	MERGANGSAN	26.818	64	9.233	34,43%
4	PAKUALAMAN	9.018	142	3.220	35,71%
5	GANDOMANAN	12.842	64	4.142	32,25%
6	NGAMPILAN	15.508	24	5.118	33,00%
7	WIROBRAJAN	21.617	61	6.912	31,97%
8	GEDONGTENGEN	17.120	197	5.825	34,02%
9	JETIS	23.636	251	8.678	36,72%
10	TEGALREJO	29.706	159	9.974	33,58%
11	DANUREJAN	16.727	28	5.268	31,49%
12	GONDOKUSUMAN	38.851	96	16.425	42,28%
13	UMBULHARJO	49.445	169	15.841	32,04%
14	KOTAGEDE	23.224	44	6.095	26,24%
JUMLAH TOTAL		329.695	1410	110.781	33,46%

(Sumber: <http://www.kpu-jogjakota.go.id/>).

potensi Fenomena tidak memilih atau golput di kota Yogyakarta, dalam Pemilihan Legislatif 2014?

Tinjauan Pustaka

Penelitian perilaku dan partisipasi politik di Indonesia bukanlah hal yang baru dilakukan. Sebelumnya tahun 1950an Greetz yang kemudian diterbitkan dalam bukunya tahun 1960 dengan judul *The Religion of Java*. Dalam tulisan tersebut Greetz dengan tegas memberikan pembagian jenis kelompok yang memiliki afiliasi agama dihubungkan dengan pilihan partai, yakni abangan dianggap berafiliasi dengan PKI, Priyayi berafiliasi dengan PNI sedangkan Santri berafiliasi dengan NU dan Masyumi.

Ananta dan Kawan-kawan (2004) dalam buku *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective* memaparkan bahwa agama dan suku di Indonesia pada pemilu 2009 menentukan perilaku memilih walaupun hal tersebut tidak begitu signifikan dalam. Hal tersebut terlihat dari distribusi pemilih yang sangat distributif pada Partai Demokrat, Partai Golkar, PKB, PPP dan PK.

Pada akhirnya perilaku memilih Indonesia berkaca dari Pilpres 2009 yang menghasilkan kemenangan ke 2 SBY yang berduet dengan Boediono menunjukkan bahwa ideologi sudah barang lama yang sedikit demi sedikit mulai di tinggalkan. Pasangan JK-Wiranto yang seharusnya menjadi representasi kalangan santri dan Islam secara umum tidak mampu memenangkan Pilpres. Begitu juga dengan pasangan Mega-Prabowo secara tidak langsung ditinggalkan oleh pemilih loyal dari PDIP sendiri dan beralih memilih SBY terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya (Mustadin, 2013).

Ideologi menurut (Susianto, 2004) menjadi olok-olokan hasil poling popularitas. Dan lebih ekstrem lagi popularitas lebih diperhatikan dibandingkan dengan kemampuan intelektual calon yang akan dipilih. Oleh sebab itu penyampaian pesan politik lebih dominan

pentingnya dibandingkan dengan substansi atau isi dari politik itu sendiri.

Seymour 1989 dalam Susianto (2004) memaparkan bahwa televisi kini merupakan bagian yang sudah terintegrasi dari kehidupan politik. Kemampuan televisi untuk menjangkau pemirsanya secara cepat dan luas, mulai dari yang tinggal di apartemen mewah hingga ke pelosok dusun, membuatnya selalu diburu oleh mereka yang hidup dari popularitas. Oleh karena itu, kandidat pejabat publik harus sangat memerhatikan penampilan dirinya ketika tampil di televisi. Mereka harus secara jeli memerhatikan baju apa yang harus dipakai, bagaimana intonasi kalimat-kalimat pidatonya, bagaimana style rambut harus ditata, aksesori apa yang mesti dipakai atau dilepas untuk memperkuat citra dirinya. Pertimbangan semacam itu pada dasarnya mengarah pada bagaimana citra diri kandidat akan dibangun di hadapan publik. Pembangunan citra diri kandidat tersebut tentunya berdasarkan hasil rekomendasi market research; apakah akan dicitrakan sebagai sosok yang cerdas, berwibawa, religius, atau yang lainnya.

LANDASAN TEORI

Partisipasi Memilih dalam Pemilu

Menjelaskan bagaimana seseorang melakukan aktivitas memilih partai politik tertentu menjadi hal yang tidak sederhana jika tidak ingin dikatakan sebagai sebuah sesuatu yang sulit. Yang menarik adalah alasan memilih tidaklah selalu alasan untuk tidak memilih. Misalnya orang yang memiliki karena ada kesamaan Ideologi dengan partai tertentu, bukan berarti orang yang tidak memilih tidak memiliki ideologi politik yang sama dengan partai yang disiapkan untuk dipilih (Mustadin, 2013).

Efek identitas partai terhadap pilihan atas partai politik sangatlah kuat. Identifikasi diri dengan partai dan pilihan atas partai secara umum hampir identik. Oleh karena hal tersebut, jika jumlah orang yang mengidentifikasi dirinya dengan partai menurun

tajam, maka tingkat stabilitas dukungan pada partai akan menurun tajam juga (Mujani, dkk., 2012). Walaupun dari pemilu ke pemilu jumlah *swing voters* sangat besar, akan tetapi jumlah pemilih tetap partai PDIP, PKB, Golkar, PPP, PKS, PAN dan Demokrat tetap saja besar.

Pada saat sekarang ini terjadi kecenderungan menurunnya jumlah orang yang merasa lebih dekat dengan partai politik. Hal tersebut mengakibatkan banyak partai politik yang mengalami penurunan jumlah pemilih. Hal ini juga memicu mudahnya memobilisasi pemilih untuk mendukung partai baru.

Menurut teori identifikasi diri (*self identification*), bahwa seseorang akan cenderung menisbatkan atau mengafiliasikan dirinya pada kelompok atau partai yang memiliki citra yang positif. Sehingga masyarakat memperoleh keuntungan psikologis yaitu identitas positif partai tersebut (Fuller, dkk., 2006). Mengidentifikasi diri para partai politik yang menurut masyarakat baik akan memberikan implikasi positif pada masyarakat tersebut, misalnya bangga menggunakan baju partai sampai pada perilaku aktif mensosialisasikan partai dan pastinya akan terlibat memilih partai tersebut (Wood et al. 1996; Chen et al. 2004; Fuller et al. 2006; Cottam, dkk., 2012).

Guna menjelaskan bagaimana proses seseorang menisbatkan diri atau mengidentifikasi diri dengan sebuah partai politik dapat digunakan teori dari Amiot dan kawan-kawan (2007). Fase tersebut antara lain; *pertama*; Kategorisasi awal (*anticipatory categorization*) karakteristiknya adalah kondisi dasar diri dimana karakteristik diri dan atribut diri diarahkan sebuah kelompok.

Kedua; Kategorisasi, pada fase ini individu atau masyarakat memiliki perbedaan diri yang tinggi, diri diisolasi dari identitas sosial yang ada, fase kategorisasi ini juga individu memiliki identitas yang lebih dominan dibanding identitas sosial yang ada, serta tidak adanya tumpang tindih interaksi antara identitas yang satu dengan yang lainnya. Ketiga; *Compartmentalization* atau fase pengkotakan

identitas, dalam fase ini berbagai macam identitas yang diidentifikasi dikategorisasikan, dan tidak ada konflik antara identitas sosial yang muncul, pada fase ini juga meningkat integrasi (*overlapping*) antara identitas yang satu dengan yang lainnya.

Keempat; fase ini disebut fase integrasi (*integration*), pada fase ini konflik identitas menemukan pemecahan dan pengakuan, *interrelasi* dan stabilitas identitas terpecahkan dengan menemukan kesamaan antara identitas yang satu dengan yang lainnya, atau minimal pengakuan antara identitas yang satu dengan yang lainnya, overlap antara identitas yang satu dengan yang lainnya mewujudkan totalitas kelompok yang sifatnya inggroup atau outgroup. Pada fase ini kemungkinan identitas yang simultan dapat diwujudkan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hal utama yang mampu memaksa masyarakat memilih dalam pemilu adalah adanya keterkaitan positif antara masyarakat dengan partai politik yang akan di pilih. Semakin kuat kelekatan positif masyarakat maka akan semakin besar partisipasi memilih masyarakat dalam memilih saat pemilu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara dan focus group discussion (FGD) dengan beberapa pemilih yang berlatar belakang agama yang berbeda dan berada dalam satu daerah pemilihan yakni Kota Yogyakarta.

Teknik analisis data yang digunakan adalah mengacu pada konsep Strauss dan Corbin (1990), teknik analisis data tersebut biasa disebut *constant comparative method* atau metode perbandingan tetap atau lebih dikenal dengan teknik analisis data *Grounded Research*. Dalam menerapkan teknik ini, peneliti menggabungkan semua data mulai dari data wawancara, dokumen, dan observasi menjadi satu kemudian mencari data yang relevan dengan data apa yang dibutuhkan. Sedangkan

tahapan teknik ini terdiri dari:

- a. Reduksi Data
Reduksi data dilakukan untuk mengidentifikasi satuan unit atau mencari kata yang memiliki makna bila dikaitkan dengan pertanyaan penelitian atau memiliki arti jika dikaitkan dengan dengan tema penelitian.
- b. Kategorisasi Data
Menyusun kategori ini adalah upaya untuk mengelompokkan data yang telah dipilah dalam tahap reduksi data kedalam kelompok yang sesuai dan memilah kata yang berulang muncul atau kata yang memiliki makna berbeda dari kategori yang telah dibuat. Misalnya:
- c. Sintetisasi
Tahap sintetisasi ini adalah mencari kaitan antara kategori satu dengan kategori yang lain, misalnya dalam tahap “sosialisasi” apakah berkaitan respon yang dimunculkan karyawan dalam kategori “respon karyawan” dan jika berkaitan maka akan dibuat gambar untuk membuat pengelompokan baru yang menjelaskan atau menggambarkan respon karyawan dalam proses sosialisasi perubahan organisasi misalnya.
- d. Teoritisasi
Proses teoritisasi ini dilakukan dengan bolak-balik membaca semua sumber informasi dan data yang belum atau sudah diolah. Kemudian setelah mendapatkan pemahaman yang “mendalam” atas informasi yang telah diperoleh, peneliti menjelaskan dengan menggunakan kemampuan “interpretasi” data tersebut dan mengambil kutipan secara langsung dari data awal, baik yang berasal dari data wawancara, observasi, maupun data hasil olah dokumen.

Langkah pertama yang dilakukan untuk verifikasi data adalah *intersubjective validity* yaitu menguji kembali (*testing out*) pemahaman peneliti dengan pemahaman responden melalui interaksi sosial yang timbal balik

(*back-and-forth*) dengan membagikan salinan deskripsi secara tekstural-struktural dari pengalaman responden (Humphrey; dalam Moustakas, 1994). Kemudian tiap responden diminta untuk secara hati-hati memeriksa deskripsi tersebut, mereka dapat memberikan tambahan masukkan dan pembetulan. Terakhir, peneliti merevisi kembali pernyataan sintesisnya (Creswell, 1998).

HASIL

Dalam kajian tentang perilaku pemilih terdapat dua konsep utama yaitu; perilaku memilih (*voting behavior*) dan perilaku tidak memilih (*non voting behavior*). Perilaku *non-voting* yaitu: *pertama*, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu; dan *kedua*, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih (Saleh, 2007).

Menurut Budiman (2006), golput bukan sebuah organisasi tanpa pengurus tetapi hanya merupakan pertemuan solidaritas. Sedangkan Sanit (1992) mengatakan bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu.

Sikap orang-orang yang golput dalam memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan di luar kontrolnya, kaum golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan. *Pertama*, menusuk lebih dari satu gambar partai. *Kedua*, menusuk bagian putih dari kartu suara. *Ketiga*, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. Bagi mereka, memilih dalam pemilu sepenuhnya adalah hak. Kewajiban mereka dalam kaitan dengan hak pilih ialah menggunakannya secara bertanggungjawab

dengan menekankan kaitan penyerahan suara kepada tujuan pemilu, tidak hanya membatasi pada penyerahan suara kepada salah satu kontestan pemilu (Sanit, 1992) Jadi berdasarkan hal di atas, golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu.

Eep Saefulloh Fatah mengklasifikasikan golput atas empat golongan. *Pertama*, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. *Kedua*, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu dan lain-lain). *Ketiga*, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. *Keempat*, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lainnya (dalam Fatah, t.t.).

Menurut Ali (1999) di Indonesia terdapat dua kelompok golput *Pertama*, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja. *Kedua*, adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada. Maupun karena mereka mengkehendaki

pemilu atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.

Menurut Arianto (2011) faktor yang menyebabkan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya secara sederhana dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok besar yaitu faktor dari internal pemilih dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah alasan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu bersumber dari dirinya sendiri, sedangkan eksternal alasan tersebut datang dari luar dirinya.

Berikut data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak penyelenggara Pemilu di Kota Yogyakarta mengenai fenomena Golput di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.

Diskusi

Golput adalah golongan yang secara sadar menyatakan untuk tidak memanfaatkan hak pilihnya dalam pemilu. Di Indonesia golput mulai muncul pada pemilu 1971 yang digagas oleh Arief Budiman, Julius Usman, dan Imam Malujo Sumali. Pada waktu itu mereka memboikot pemilu sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap tidak demokratis dengan membatasi kebebasan seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepartaian maupun mendirikan partai-partai politik. Dengan membatasi jumlah partai, pemerintah sudah melanggar asas demokrasi yang paling mendasar, yakni kemerdekaan berserikat dan berpolitik (Budiman, 2006). Sikap ini muncul dari ketidaksenangan terhadap campur tangan pemerintah yang mengintervensi secara langsung partai politik yang ada dan menolak kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengerahan massa yang hanya dikhususkan untuk mendukung partai pemerintah, disisi lain masyarakat hanya di-

Tabel 2. Kondisi Golput di Kota Yogyakarta.

Pertanyaan	Hasil wawancara (Kode)	Kode	Kesimpulan
Data golput di Kota Yogyakarta	Dan sebenarnya angka kurang lebih 30 persen kalau bisa saya contohkan waktu pemilu KaDa kemarin 12 persen itu memang alasannya administrasi kependudukan itu, baru sisanya dia yang benar-benar golput tidak mau menggunakan hak pilihnya.	(A: W1. B 23-26)	Pada pemilu 2009 angka golput di Kota Yogyakarta mencapai 31,32 persen. 10-12 persen diakui disebabkan persoalan administrasi kependudukan
Penyebab tingginya angka golput di Kota Yogyakarta	<p>Yang pertama, kaitannya dengan golput itu tidak lepas dari proses penyusunan daftar pemilih. Di pemilu 2009 lalu, KPU tidak dimungkinkan untuk mencoret pemilih-pemilih yang pindah domisili, artinya secara de-jure, secara keadministrasian yang bersangkutan masih warga Kota Yogyakarta, namun secara de-facto dia sudah tidak berdomisili di wilayah tersebut.</p> <p>Jadi ketika seseorang itu tinggal berdomisili di Kota Yogyakarta dan memiliki KTP Yogyakarta, kemudian pindah ke luar Kota Yogyakarta dengan tidak diikuti proses perpindahan administrasinya maka itu yang jadi persoalan.</p> <p>Kemudian kalau berbicara tentang golput ee maka Kota Yogyakarta ini merupakan kota pendidikan, sebagian besar penduduknya bisa dikatakan <i>melek</i> politik lah... dan mereka tahu betul mengapa mereka tidak akan menggunakan hak pilihnya. Namun demikian angkanya tidak bisa kalkulasikan, mungkin saja selain persoalan administrasi tadi mungkin bisa saja mereka memiliki kesadaran untuk tidak memilih</p> <p>Bahwa kesadaran masyarakat Yogyakarta untuk <i>melek</i> politik cukup bagus, ketika mereka melihat pemilu yang tidak cukup berkorelasi terhadap peningkatan kesejahteraan, perbaikan-perbaikan, dan harapan-harapan maka golput itu menjadi pilihan mereka.</p>	<p>(A: W1. B 8-13)</p> <p>(A: W1. B 48-51)</p> <p>(A: W1. B 35-40)</p> <p>(A: W1. B 52-55)</p>	<p>Alasan pertama, masih adanya ketidakakuratan data pemilih tetap karena mobilitas warga Kota Yogyakarta yang tinggi dan tidak teradministrasikan, sehingga masih ditemukan banyak pemilih yang tidak faktual.</p> <p>Alasan kedua, sebagian warga Kota Yogyakarta memiliki kesadaran untuk tidak memilih dikarenakan faktor pendidikan yang cukup dan melek secara politik. Yaitu mereka yang menilai pemilu tidak cukup berkorelasi terhadap peningkatan kesejahteraan, perbaikan-perbaikan, dan harapan-harapan mereka.</p>
Faktor lain	Kelompok-kelompok yang menyuarakan untuk tidak memilih saya pikir ada.. ee sebenarnya kan tidak hanya dari kelompok yang tahu proses politik dan peta politik, namun juga dari kelompok agamawan yang tidak mau mengakui sistem demokrasi dan pemilihan itu, di Kota ini juga da kelompok-kelompok yang seperti itu, namun saya pikir mereka tidak banyak ya, artinya gerakan-gerakan mereka itu tidak bisa mengakar dan kemudian tidak bisa mengarah pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.	(A: W1. B 58-65)	Adanya kelompok-kelompok yang menyuarakan golput sebagai pilihan dalam pemilu turut memberi pengaruh terhadap angka partisipasi pemilih.
Strategi yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta untuk mengurangi angka golput	karena golput bisa disebabkan oleh dua hal tadi. Artinya setelah kita cocokkan dan setelah kita memperbaiki daftar pemilih itu.	(A: W1. B 75-77)	Pertama, dengan melakukan perbaikan daftar pemilih dengan cara terus mencocokkan data kependudukan yang sebenarnya guna mengurangi jumlah daftar pemilih yang tidak faktual.

	<p>Kemudian yang kedua kita mengupayakan dengan mengadakan sosialisasi yang terstruktur dan sistematis melalui panitia kita di PPK dan PPS, kemudian kita juga mengadakan kegiatan sosialisasi melalui media-media yang belum tersentuh oleh PPK dan PPS itu. Sosialisasi dalam bentuk tatap muka justru menjadi bentuk sosialisasi yang efektif, jadi menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, menghadiri kegiatan-kegiatan di masyarakat</p> <p>Yang kita lakukan di tahun 2013 ini ada TOT siswa SMP-SMA se-Kota Yogyakarta untuk pemilu, itu menjadi salah satu upaya kita untuk sistematis mengajak pemilih pemula melalui teman sebaya</p> <p>Kemudian upaya untuk mengandeng organisasi-organisasi keagamaan massa itu sebenarnya juga pernah dilakukan namun untuk pemilu 2014 ini kita belum melangkah ke itu, namun kita punya agenda, kita punya rencana untuk melakukan safari silaturahmi ke lembaga-lembaga itu untuk mengajak memberi ruang pada mereka untuk dapat ikut berpartisipasi dalam sosialisasi.</p>	<p>(A: W1. B 81-88)</p> <p>(A: W1. B 117-119)</p> <p>(A: W1. B 121-127)</p>	<p>Kedua, melakukan sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui media cetak maupun elektronik yang dilakukan segenap pihak penyelenggara pemilu, baik KPU Kabupaten, PPK, PPS, serta Relawan Demokrasi yang dibentuk berdasarkan kebijakan KPU Pusat.</p> <p>Pelibatan instansi pendidikan dilakukan untuk melibatkan para siswa ikut berpartisipasi dalam mengajak dan mensosialisasikan pemilu kepada teman sebaya.</p> <p>Sedangkan upaya untuk mengandeng organisasi-organisasi keagamaan baru dalam proses perencanaan.</p>
Kebijakan lain yang mendukung prediksi turunnya angkat golput	saat ini sudah mulai baik karena proses pemilu 2014 ini ada e-KTP yang kemungkinan sudah cukup baik terkait administrasi kependudukan itu.	(A: W1. B 28-30)	Daftar pemilih dapat lebih akurat karena adanya pendataan ulang penduduk melalui program e-KTP
Prediksi angka golput pada pemilu 2014	<p>Dari dua hal itu kami juga optimis kalau di pemilu 2014 khususnya di Kota Yogyakarta akan lebih baik tingkat partisipasinya.</p> <p>ee... sekitar 72'an mungkin yang akan berpartisipasi. Kisarannya bisa diangka 72 persen itu lah. Kita tidak berani mematok angka 75 persen seperti nasional ya, Kota kan kondisinya berbeda dengan daerah ya. Kalau misalnya bisa 70-72 persen itu sudah bagus.</p>	<p>(A: W1. B 159-161)</p> <p>(A: W1. B 164-167)</p>	<p>Optimis bahwa angka partisipasi pemilih dalam pemilu 2014 di Kota Yogyakarta akan mengalami peningkatan</p> <p>Ketua KPU Kota Yogyakarta memprediksi peningkatan angka keterlibatan pemilih pada pemilu 2014 menjadi sekitar 72 persen</p>

arahkan untuk bekerja dan tidak punya peran sama sekali dalam dunia perpolitikan.

Saat itu, berbagai kelompok mahasiswa bersatu dan menganjurkan pada para pemilih untuk melakukan pencoblosan di luar prosedur resmi yang telah dipersyaratkan pemerintah. Kelompok ini oleh Arief Budiman dinamakan golput yang mengacu pada rekomendasi kelompok untuk mencoblos bagian kosong (putih) dari kertas pemilu. Disamping kekecewaan terhadap pemerintahan, partai-partai politik juga hanya dijadikan sebagai mesin politik bagi rezim yang sedang berkuasa. Orang-orang yang memimpin partai politik

muncul sebagai elit pemerintah yang menjadi corong bagi program-program pemerintah. Mereka sama sekali terpisah dengan rakyat dan tidak berpihak bagi kepentingan rakyat yang meningkatkan kemuakan di tingkat akar rumput (*grass root*) terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, serta kota-kota besar lainnya muncul sikap apatisisme dari masyarakat terhadap partai yang ada. Golput politik yang ada dan digagas oleh Arief Budiman dan kawan-kawan merupakan sikap yang secara sadar dilakukan sebagai sebuah gerakan moral yang merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan terhadap

partai-partai politik.

Berikut beberapa faktor yang menentukan seseorang golput dalam Pemilihan Umum :

Faktor Internal

Faktor Teknis

Faktor teknis yang dimaksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih dan muncul saat pemilihan sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Misalnya pemilih sedang sakit pada saat pemilihan, pemilih sedang ada kegiatan lain serta berbagai hal lainnya yang bersifat pribadi. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor teknis ini dapat di klasifikasikan menjadi dua yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa di tolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah pada saat pemilihan ataupun sedang berada di luar kota.

Teknis yang dapat di tolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan pemilih tidak datang ke TPS. Misalnya keperluan keluarga, adanya rencana liburan pada saat hari pemilihan dan lain-lain. Pada kasus-kasus seperti ini pemilih masih bisa mensiasatinya, yaitu dengan cara mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu baru melakukan aktivitas atau keperluan yang bersifat pribadi.

Pemilih golput yang karena alasan teknis yang tipe kedua ini cenderung tidak mengetahui essensi dari menggunakan hak pilih, sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada menggunakan hak pilihnya. Pemilih ideal harus mengetahui dampak dari satu suara yang diberikannya dalam pemilu. Hakikatnya suara yang diberikan itulah yang menentukan masa depan pemerintahan negara selama lima tahun yang akan datang.

Faktor Pekerjaan

Faktor pekerjaan yang dimaksud adalah aktivitas keseharian pemilih. Faktor ini memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Banyak dari sektor informal yang baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani harian. Ada juga beberapa pekerjaan yang mengharuskan seseorang meninggalkan tempat tinggalnya seperti pelaut, penggali tambang, penjaga kilang minyak di lepas pantai dan lain-lain. Kondisi seperti membuat mereka harus tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS. Pemilih dalam kondisi seperti inidihadapkan pada dua pilihan menggunakan hak pilih yang akan mengancam berkurangnya penghasilannya atau pergi bekerja dan tidak memilih.

Faktor Eksternal

Faktor ekstenal adalah faktor faktor penyebab seseorang tidak memilih yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ada tiga yang masuk pada kategori ini menurut pemilih yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik.

Faktor Administratif

Faktor adminisistratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan, tidak memiliki identitas kependudukan (KTP), dan lain-lain. Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Kasus pemilu legislatif 2009 adalah bukti banyaknyamasyarakat Indonesia yang tidak bisa ikut dalam pemilu karena tidak terdaftar sebagaipemilih. Jika kondisi ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan ter-

gabung kedalam kategori golput. Faktor yang menjadi penghalang dari aspek administrasi adalah permasalahan kartu identitas. Masih ada masyarakat yang tidak memiliki KTP. Jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak akan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena secara administratif KTP yang menjadi rujukan dalam mendaftarkan dan membuat DPT.

Golput yang diakibatkan oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih. Selain itu dituntut inisiatif masyarakat untuk mendatangi petugas pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Langkah berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) harus tempel di tempat-tempat strategis agar bisa dibaca oleh masyarakat. Masyarakat juga harus berinisiatif melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segera melapor ke pengurus RT atau petugas pendataan. Langkah berikutnya untuk meminimalisir terjadinya golput karena aspek administrasi adalah dengan memanfaatkan data kependudukan berbasis IT. Upaya elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang dilakukan pemerintahan sekarang ini sangat efektif dalam meminimalisir golput administratif.

Sosialisasi

Sosialisasi atau menyebarluaskan informasi pelaksanaan pemilu sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/RW.

Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Pada Pemilu 1999 diikuti sebanyak 48 partai politik, pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik dan pemilu 2009 diikuti oleh

41 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Kondisi ini menuntut perlunya sosialisasi terhadap masyarakat. Permasalahan berikut yang menuntut perlunya sosialisasi adalah mekanisme pemilihan yang berbeda antara pemilu sebelum reformasi dengan pemilu sebelumnya. Dimana pada era orde baru hanya memilih lambang partai sementara sekarang selain memilih lambang juga harus memilih nama salah satu calon di partai tersebut. Perubahan yang signifikan adalah pada pemilu 2009 dimana kita tidak lagi mencoblos dalam memilih tetapi dengan cara menandai.

Kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan pentingnya sosialisasi dalam rangka sukseskan pelaksanaan pemilu dan meminimalisir angka golput dalam setiap pemilu. Terlepas dari itu semua penduduk di Indonesia sebagian besar berada di pedesaan maka menyebarluaskan informasi pemilu dinilai penting, apalagi bagi masyarakat yang jauh dari akses transportasi dan informasi, maka sosialisasi dari mulut ke mulut menjadi faktor kunci dalam mengurangi golput.

Faktor Politik

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan pemilih terhadap partai, tidak memiliki pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan bagi kondisi masyarakat. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Image bahwa politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya akan lebih memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilihnya. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan atau pemimpin "karbitan". Politik dimana seorang pemimpin baru akan mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu.

Faktor lain adalah banyaknya politisi yang jiwa kepemimpinannya tidak mengakar kuat dalam masyarakat, politisi yang jauh dari hati rakyat serta tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat dengan para petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan. Mereka lebih menggantungkan diri pada pemimpinnya dibandingkan mendekati diri dengan konstituen atau pemilihnya. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbedapartai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik.

Politik pragmatik yang semakin menguat, baik dikalangan politisi maupun disebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangkan sebagian masyarakat kita saat ini hanya akan memenuhi hak politiknya jika ada transaksi-transaksi materi yang menguntungkan dirinya. Misalnya pemilih mau mendukung salah satu kandidat atau partai politik jika dia mendapatkan keuntungan materi. Kondisi-kondisi inilah yang secara politik mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian Masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi. Harus diakui tidak semua politisi seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Ada beberapa faktor yang menjadi Penentu terjadinya golput di Kota Yogyakarta antara lain: *pertama*; Faktor teknis yang dimaksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih dan muncul saat pemilihan sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Misalnya pemilih sedang sakit pada saat pemilihan. *Kedua*; Faktor pekerjaan yang dimaksud adalah aktivitas keseharian pemilih. Faktor ini memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak

memilih. *Ketiga*; Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan, tidak memiliki identitas kependudukan (KTP), dan lain-lain. Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya jika tidak terdaftar sebagai pemilih.

Keempat; faktor terakhir yang menjadi faktor pendorong munculnya golput di kota Yogyakarta adalah faktor politik. Faktor politik yaitu alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan pemilih terhadap partai, tidak memiliki pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawaperubahan dan perbaikan bagi kondisi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, A., Arifin, N.A., & Suryadinata, L. (2004) *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore; Institute of South Asian Studies.
- Amiot, C. E., Sablonniere, R. D. L., Terry, J. T., & Smith, J. R. (2007). Integration of Social Identities in the Self: Toward a Cognitive-Developmental Model. *Personality and Social Psychology Review*, *11*, 364-388.
- Chen, S., Chen, Y. K., & Shaw, L. (2004). Self-Verification Motives at Collective Level of Self-Definition. *Journal of Personality and Social Psychology*, *86*, 77-94.
- Cottam, M.L., Dietz-Uhler, B., Mastors, E., Preston, T. (2012) *Pengantar Psikologi Politik*. Depok; Rajawali Press.
- Creswell, J. W. (2002). *Eduational Research; Planning, Conducting, nd Evaluating Quantitative and Qualitative Rreserach*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Fuller J B., Marler L., Hester K., Frey. L., & Relyea, C. (2006). *Construed External*

- Image and Organizational Identification: A test of Moderating Influence of Need for Self-Esteem. *Journal of Social Psychology*, 146, 701-706.
- Mujani, S., Liddle, R.W., & Ambardi, K (2012). *Kuasa Rakyat Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde-Baru*. Jakarta; Mizan.
- Mujani, S & Liddle, R.W. (2010). Personalities, Parties, and Voters. *Journal of Democracy*. 21, 2. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.
- Mustadin, (2013). Puasa sebagai Momentum Pemilu Bersih 2014. *www.kompasiana.com*.
- Susianto, B. (2004) Pergeseran Perilaku Pemilih Indonesia. Kompas, tanggal: 28 Sep 04) (<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0409/28/opini/1291305.htm>).
- Ali, N. (1999). *Peradaban Komunikasi Politik*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Arianto, B. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat tidak memilih dalam pemilu, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Budiman, A. (2006). *Kebebasan, Negara, Pembangunan*, Pustaka Alvabet, Jakarta.
- Sanit, A. (1992). *Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Straus, A., & Corbin, J. (1990). *Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. London. Sage Publications.